



**Implementasi Perda No. 3 Tahun 2018 Tentang Penanggulangan
Kemiskinan di Desa Sukamandi Hilir Dusun IV Kecamatan Pagar
Merbau Kabupaten Deli Serdang**

**Implementation of Perda No. 3 of 2018 Concerning Poverty Reduction
in Sukamandi Hilir Village, Hamlet IV, Pagar Merbau District, Deli
Serdang Regency)**

Masita Devi, Indra Muda, & Walid Mustafa

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik,
Universitas Medan Area, Indonesia

Abstrak

Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dari program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan implementasi kebijakan tentang penanggulangan kemiskinan di Desa Sukamandi Hilir dan untuk mengetahui faktor penghambat dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan telaah dokumentasi. Data yang sudah dikumpulkan kemudian diuji validitasnya dengan menggunakan teknik pengujian triangulasi data. Analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan dengan variabel-variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter dan van Horn, Implementasi Perda No. 3 Tahun 2018 tentang penanggulangan kemiskinan di Desa Sukamandi Hilir Dusun IV tidak berjalan maksimal karena kurangnya komunikasi dan koordinasi dalam proses pelaksanaannya, hal tersebut juga menyebabkan beberapa program tidak terlaksanakan sebagaimana mestinya.

Kata Kunci: Kemiskinan; Implementasi; Penanggulangan Kemiskinan.

Abstract

Poverty alleviation is a policy of government and local government programs that are carried out systematically, planned, and in synergy with the business world and the community to reduce the number of poor people in order to improve the welfare of the people. This study aims to find out how the process of implementing policies on poverty reduction in Sukamandi Hilir Village is and to find out the inhibiting factors in implementing these policies. This type of research is descriptive qualitative. Data collection techniques through observation, interviews and documentation review. The data that has been collected is then tested for validity using data triangulation testing techniques. Data analysis includes data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Based on the variables that influence the implementation of the policies proposed by Van Meter and van Horn, the implementation of Perda no. 3 of 2018 concerning poverty alleviation in Sukamandi Hilir Village, Dusun IV did not run optimally due to a lack of communication and coordination in the implementation process, this also caused several programs not to be implemented properly.

Keywords: Poverty, Implementation, Poverty Reduction.

How to Cite: Devi, M. Muda, I. & Mustafa, W. (2022). Implementasi Perda No.3 Tahun 2018 Tentang Penanggulangan Kemiskinan di Desa Sukamandi Hilir Dusun IV Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang, *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pemerintahan (JIAAP)*, 1(2) 2022: 108-113,

*E-mail: walid@staff.uma.ac.id

ISSN [2828-6537](https://doi.org/10.31289/jiaap.v1i2.1162) (Online)



PENDAHULUAN

Pada dasarnya kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan yang disebabkan oleh tidak terpenuhinya kebutuhan dasar dan sulitnya mengakses pendidikan dan pekerjaan. Selama ini pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan kemiskinan yang ada, namun secara keseluruhan belum maksimal hasilnya (Suyanto, 1996). Pemerintah Kabupaten Deli Serdang telah menerbitkan Peraturan Daerah Penanggulangan Kemiskinan Nomor 3 Tahun 2018 yang bertujuan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin. Perda No 3 Tahun 2018 Program Penanggulangan Kemiskinan meliputi program berbasis keluarga, program pemberdayaan berbasis masyarakat, program pemberdayaan berbasis usaha mikro, dan program lainnya yang secara langsung maupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin (Sitepu et al., 2019)(Hia et al., 2021).

Kemiskinan adalah sebuah masalah yang melanda banyak negara, termasuk Indonesia. Ini adalah kondisi ketidakmampuan seseorang atau sekelompok orang untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam kehidupan sehari-hari, seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan akses ke layanan kesehatan. Kemiskinan sering disebabkan oleh sejumlah faktor kompleks, termasuk ketidaksetaraan dalam pendistribusian sumber daya ekonomi, kesenjangan dalam pendapatan, dan kesulitan dalam mengakses pekerjaan dan pendidikan yang layak (Kusumajati & Kurniawan, 2019).

Meskipun pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah untuk mengatasi masalah kemiskinan, tantangan ini masih belum sepenuhnya terpecahkan. Upaya-upaya pemberian bantuan sosial dan program-program pengentasan kemiskinan telah diimplementasikan, tetapi dampaknya belum mencapai hasil yang optimal secara keseluruhan (Halawa & Batubara, 2022; Istriawati & Dartanto, 2022).

Di Kabupaten Deli Serdang, pemerintah setempat telah mengambil tindakan konkret dengan menerbitkan Peraturan Daerah Penanggulangan Kemiskinan Nomor 3 Tahun 2018. Tujuan dari peraturan ini adalah mengurangi jumlah penduduk miskin di wilayah tersebut. Peraturan ini mencakup sejumlah program, seperti program berbasis keluarga, program pemberdayaan berbasis masyarakat, dan program pemberdayaan berbasis usaha mikro. Program-program ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya mengatasi kemiskinan, membangun ekonomi lokal, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin.

Untuk mencapai perjuangan melawan kemiskinan yang lebih berhasil, perlu adanya komitmen yang kuat dari semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Hal ini memerlukan perencanaan yang matang, pengawasan yang ketat, dan penggunaan sumber daya yang efektif. Selain itu, kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam program-program ini juga sangat penting. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan bahwa Indonesia dapat membuat kemajuan yang lebih besar dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang masih berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya (Larasati et al., 2018).

Penulis mengutip temuan-temuan relevan dari kajian Ahmad Tontowi dalam tesis yang berjudul "Studi Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2kp) di Desa Purbayana Kabupaten Sukoharjo". Secara rinci, hasil survei ditunjukkan di bawah ini. Dari seluruh tahapan yang dilakukan, mulai dari tahap perencanaan, pengelolaan, pemeliharaan, dan pelaporan, tahap yang optimal sudah dilaksanakan, namun belum. Beberapa kendala telah diidentifikasi dalam pelaksanaan program P2CP ini. Diantaranya hambatan terhadap aturan praktik yang tidak jelas, hambatan komunikasi, hambatan sumber daya terutama pendanaan, hambatan pelaksanaan sikap yang umumnya subjektif, dan hambatan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Namun, hambatan implementasi ini telah sepenuhnya diatasi.

Masalah umum yang dihadapi dalam melaksanakan kebijakan penanggulangan kemiskinan adalah program penanggulangan kemiskinan biasanya tidak efektif, program pemerintah tidak dapat dilaksanakan dan dilaksanakan secara berbasis masyarakat, dan sumber daya manusia tidak dikelola dengan baik, juga mengarah pada program pemerintah (Ujung & Rangkuti, 2014)(Harahap et al., 2016, 2016; Jamaluddin et al., 2019). Partisipasi masyarakat dalam program pengentasan kemiskinan masih bersifat fiktif dan tidak mandiri sehingga tidak terlembagakan di kalangan masyarakat miskin (Tontowi, 2010).. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Perda No.3 Tahun 2018 Tentang Penanggulangan Kemiskinan di Desa Sukamandi Hilir Dusun IV Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang dan untuk mengetahui faktor penghambat dalam mengimplementasikan Perda No.3 Tahun 2018 Tentang

Penanggulangan Kemiskinan di Desa Sukamandi Hilir Dusun IV Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi metode penelitian kualitatif sebagai kerangka kerja untuk menggali dan memahami fenomena yang sedang diteliti. Strauss dan Corbin (1997), sebagaimana yang dikutip dalam buku Jusup Soewadji (2012), menggambarkan metode kualitatif sebagai pendekatan penelitian yang menghasilkan pemahaman yang mendalam dan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai melalui prosedur atau pendekatan kuantitatif (Soewadji, 2012). Mulyana (2001) juga mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk mempertahankan dan menganalisis perilaku manusia dalam bentuk dan konteksnya, tanpa mengubahnya menjadi entitas kuantitatif. Dalam konteks penelitian ini, metode kualitatif digunakan untuk mengungkap aspek-aspek kualitatif dari fenomena yang sedang diteliti (Mulyana, 2015).

Proses penelitian dimulai dengan pengumpulan data dari berbagai sumber yang relevan. Data-data ini dapat berupa wawancara mendalam, observasi, dokumen, atau catatan lapangan lainnya. Setelah data terkumpul, tahap analisis menjadi langkah selanjutnya. Analisis data kualitatif melibatkan proses pemahaman dan interpretasi, yang memungkinkan peneliti untuk menemukan pola-pola, tema-tema, dan makna yang terkandung dalam data. Analisis ini mendorong refleksi mendalam tentang fenomena yang sedang diteliti (Mulyana, 2015).

Hasil analisis data kualitatif kemudian digunakan untuk membentuk kesimpulan penelitian. Kesimpulan ini akan mencerminkan pemahaman mendalam tentang topik yang sedang diteliti, serta jawaban terhadap rumusan masalah dan uji hipotesis yang diajukan dalam penelitian. Metode penelitian ini memberikan keleluasaan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang lebih kompleks dan mendalam tentang fenomena manusia, sehingga dapat memberikan kontribusi berharga dalam mengembangkan pemahaman dalam bidang yang sedang diteliti.

Lokasi penelitian yang dipilih, yaitu Desa Sukamandi Hilir Dusun IV di Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang, menjadi tempat yang relevan dan strategis untuk mengkaji masalah kemiskinan. Penulis memulai penelitian ini pada bulan September 2020 dan menyelesaikannya pada bulan Maret 2021. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada fakta bahwa Desa Sukamandi Hilir Dusun IV merupakan salah satu desa dengan jumlah penduduk miskin yang signifikan di antara desa-desa lain di wilayah Sukamandi Hilir. Walaupun telah diterapkan Perda No.3 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Kemiskinan, penulis memfokuskan penelitiannya pada desa ini karena perubahan yang diharapkan belum terlihat secara signifikan di masyarakat.

Penggunaan informan dalam penelitian ini sangat penting untuk mengumpulkan data dan informasi yang relevan. Terdapat tiga jenis informan dalam penelitian ini, sesuai dengan metode yang digunakan (Mulyana, 2015)(Suyanto & Sutinah, 2011). Pertama, informan kunci, yang dalam konteks ini adalah Kepala Desa Sukamandi Hilir, memiliki peran utama dalam memberikan wawasan tentang situasi dan kebijakan di desa. Kedua, informan utama, yang merupakan Kepala Dusun IV Sukamandi Hilir, memberikan perspektif yang lebih terperinci tentang kondisi di tingkat dusun. Terakhir, informan tambahan, yang merupakan masyarakat di desa tersebut, memberikan sudut pandang yang lebih luas dan beragam tentang masalah kemiskinan.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini mencakup berbagai tahapan, mulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, analisis data, hingga pengambilan kesimpulan (Suyanto & Sutinah, 2011)(Miles et al., 2014). Selama proses ini, penulis mengumpulkan informasi yang beragam dan menggunakannya untuk merumuskan pemahaman yang lebih baik tentang permasalahan kemiskinan di Desa Sukamandi Hilir Dusun IV. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi kemiskinan di tingkat desa dan potensi solusi untuk mengatasi masalah tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Sukamandi Hilir merupakan desa paling utara di kecamatan Pagar Merbau yang merupakan bagian dari Kabupaten Deli Serdang. Desa Sukamandi Hilir merupakan desa pertanian pangan khususnya budidaya padi dengan dukungan sistem irigasi Sei Ular. Desa Sukamandi Hilir merupakan salah satu kandang padi di kawasan Pagar Merbau, dengan hasil rata-rata 2.400 ton per musim panen. Desa Sukamandi hilir berdiri pada bulan Oktober 1950, tahun dimana kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia diambil alih oleh pemerintah Kerajaan Belanda yang menjajah negara Deli Serdang pada saat itu. Pemerintah daerah dijabat oleh M. Tarigan sebagai

pembantu Wadana. Implementasi perda No. 3 tahun 2018 tentang penanggulangan kemiskinan di Desa Sukamandi Hilir Dusun IV mengacu pada model teori Van Meter dan Van Horn. Menurut teori Van Meter dan Van Horn dalam (Muda & Batubara, 2019) “implementasi merupakan suatu model dasar yang dilukiskan dalam enam variabel yang membentuk ikatan (*linkage*) antara kebijakan dan pencapaian (*Performance*)”. Mereka menyatakan bahwa secara implisit, kaitan yang tercakup menjelaskan hipotesis-hipotesis yang dapat diuji secara empirik. Selain itu indikator-indikator yang memuaskan dapat dibentuk dapat dikumpulkan. Dalam pendekatan masalah seperti ini, itu independen. Saya sangat ingin menjelaskan prosesnya dengan melihat bagaimana keputusan kebijakan diimplementasikan, daripada hanya menghubungkan variabel dan variabel dependen dengan cara apa pun. Ada beberapa variabel yang digunakan pembuat kebijakan sebagai indikator untuk menentukan keberhasilan implementasi kebijakan diantaranya:

Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan, Van Meter dan Van Horn, menyarankan bahwa pengukuran kinerja implementasi kebijakan memastikan bahwa kriteria dan tujuan tertentu yang perlu dipenuhi oleh politisi ditekankan. Anda harus menjangkau praktisi yang pada dasarnya merupakan pencapaian politik dalam menilai pencapaian kriteria dan tujuan tersebut. Penting untuk memahami tujuan umum standar dan tujuan kebijakannya. Implementasi kebijakan yang berhasil dapat menjadi tidak berhasil jika pejabat tidak sepenuhnya menyadari standar dan tujuan kebijakan. Pelaksana kebijakan harus memahami tujuan kebijakan dan termotivasi untuk melaksanakannya. Kelemahan birokrasi dapat menghambat implementasi kebijakan. Aspek pertama adalah mekanisme. *Standart Operating Procedur (SOP)* biasanya dibuat saat Anda menerapkan arahan. Sop merupakan pedoman berjalan bagi seluruh pelaksana, agar implementasi kebijakan tidak menyimpang dari tujuan dan sasaran kebijakan. Arah di mana para pelaksana melanggar standar dan tujuan kebijakan adalah masalah "signifikan". Pelaksana tidak dapat mengimplementasikan kebijakan karena tidak memahami tujuan dari kebijakan tersebut. Dari hasil wawancara dengan pihak yang berwenang dalam melaksanakan program penanggulangan kemiskinan di Desa Sukamandi Hilir Dusun IV mengatakan menjelaskan bahwa sosialisasi tentang Perda No 3 Tahun 2018 tentang penanggulangan kemiskinan tersebut belum sampai kepada pemerintah desa, sehingga pemerintah desa tidak mengetahui detail program dan tujuan yang tertulis dalam kebijakan tersebut sehingga hanya menjalankan program-program yang sudah sampai sosialisasinya kepada pemerintah desa. Dengan ketidakjelasan dari kebijakan tersebut mengakibatkan pelaksanaan implementasi tidak berjalan sesuai rencana kebijakan, dan menyebabkan banyak program-program yang tidak terlaksana sehingga implementasi tidak berjalan maksimal.

Sumber-sumber Kebijakan, sumber daya dalam implementasi kebijakan merupakan faktor penting. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung pada ketersediaan sumber daya yang tersedia. Orang adalah sumber daya yang paling penting untuk keberhasilan implementasi kebijakan apapun. Pada setiap tahap implementasi, diperlukan ketersediaan personel yang berkualitas untuk pekerjaan yang dipersyaratkan oleh kebijakan non-politik. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan temporal merupakan fondasi penting untuk menghitung keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber-sumber tersebut adalah pendanaan atau insentif lain untuk mendorong dan mendorong implementasi yang efektif. Lihat Perda No 3 Pasal 37 Tahun 2018. Sumber pendanaan bagi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan. Terkait: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), APBD Kabupaten Deli Serdang, dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat. Kurangnya sumber daya atau insentif lain untuk pelaksanaan langkah-langkah politik atau yang terbatas memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kegagalan pemerintah, desa dan pemerintah daerah untuk menerapkan langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut.

Komunikasi dan pelaksanaan kegiatan antar organisasi, komunikasi di dalam dan antar organisasi merupakan proses yang kompleks dan sulit. Oleh karena itu, implementasi yang efektif ditentukan oleh kejelasan langkah-langkah dan tujuan dan tercermin dalam akurasi dan konsistensi dalam mengkomunikasikan langkah-langkah dan tujuan tersebut. Komunikasi merupakan salah satu faktor terpenting dalam menyampaikan pesan pembangunan secara efektif kepada masyarakat. Komunikasi yang dilakukan membantu mengkomunikasikan kebijakan pembangunan kepada masyarakat. Namun kenyataannya, tidak ada komunikasi antara instansi pemerintah dengan masyarakat dalam implementasi Perda No 3 Tahun 2018. Minimnya sosialisasi antara instansi pemerintah dan masyarakat menyebabkan kurangnya minat masyarakat untuk ikut serta meningkatkan pembangunan desa. Minimnya komunikasi antara elit

pemerintah dengan masyarakat inilah yang mengakibatkan kemiskinan di Desa Skamandi Hilir hingga saat ini.

Kecenderungan pelaksana, kecenderungan pelaksana adalah salah satu faktor yang mempengaruhi kebijakan selain komunikasi dan sumber daya. kecenderungan pelaksana merupakan komitmen dan respon pelaksana kebijakan terhadap implementasi regulasi. Ketika lembaga penegak berada dalam posisi yang baik, ia dapat melaksanakan kebijakan seperti yang diinginkan pembuat kebijakan. Di sisi lain, perbedaan sikap dan pandangan pembuat kebijakan membuat proses implementasi kebijakan menjadi tidak efektif. Keterlibatan yang baik diharapkan akan berdampak positif terhadap implementasi kebijakan. Komitmen Pemerintah Desa Skamandi Hiril terhadap program penanggulangan kemiskinan sangat baik. Hal ini terlihat ketika pemerintah desa Skamandi Hiril mendukung rumah tangga binaan. Seperti disebutkan di atas, bantuan yang diterima bervariasi, termasuk bantuan dana untuk bedah rumah. Sebelum bantuan diberikan, pemerintah desa memiliki kesepakatan atau pengaturan bahwa bantuan tersebut tidak dapat digunakan untuk keperluan rumah tangga lainnya. Pemerintah desa terus memantau pembangunan rumah bagi warga penerima bantuan. Dengan terlaksananya kesepakatan tersebut, tidak ada kecurangan dalam pelaksanaan program preventif. Pastikan tidak ada konflik antara pemerintah desa dan masyarakat.

Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik Ketika menilai kinerja implementasi kebijakan, penting untuk mempertimbangkan bagaimana lingkungan eksternal berkontribusi terhadap keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menimbulkan masalah dalam efisiensi implementasi kebijakan. Oleh karena itu, upaya implementasi kebijakan memerlukan lingkungan eksternal yang memfasilitasi. Dalam melaksanakan kebijakan, sangat penting bahwa lingkungan, masyarakat dan politik didukung, dipengaruhi dan dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan. Dalam hal ini, partisipasi masyarakat diperlukan untuk keberhasilan pelaksanaan langkah-langkah penanggulangan kemiskinan. Selain sebagai penerima bantuan, masyarakat turut serta dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan. Masyarakat perlu proaktif dalam mencari informasi dan menyampaikan pemikiran dan gagasannya kepada pemerintah desa untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan agar kebijakan penanggulangan kemiskinan dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah desa harus memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat dalam proses implementasi kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat di Desa Skamandi Hilir Dusun IV, mereka menyatakan bahwa pemerintah desa tidak pernah terlibat langsung dengan masyarakat. Masyarakat hanya mengikuti semua instruksi dari pemerintah desa. Akibatnya masyarakat Desa Skamandi Hilir tidak tertarik untuk mengikuti program yang ada karena masyarakat kurang memahami maksud dari pedoman individu tersebut. Akibatnya, banyak program penanggulangan kemiskinan yang tidak dilaksanakan atau dilaksanakan secara optimal. Masyarakat merupakan faktor utama dalam keberhasilan suatu kebijakan. Tanpa saran dan upaya langsung masyarakat, kebijakan penanggulangan kemiskinan tidak akan efektif. Terlepas dari dukungan dan partisipasi masyarakat, tentunya tidak terlepas dari peran pemerintah itu sendiri. Peran pemerintah dan masyarakat harus bersinergi untuk memastikan pelaksanaan program/kegiatan memenuhi harapan semua orang.

Karakteristik badan-badan pelaksana, perhatian terhadap lembaga pelaksana, meliputi organisasi formal dan informal yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan memiliki karakteristik yang tepat dan sangat dipengaruhi oleh penegak hukum yang serasi. ini terkait dengan konteks kebijakan yang diwujudkan dalam beberapa arahan yang menuntut lembaga penegak hukum yang tegas dan disiplin. Sesuai dengan Pasal 29 dan 30 Perda Tahun 2018 tentang Penanggulangan Kemiskinan, TKPK (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan) dibentuk untuk lebih mengoordinasikan penanggulangan kemiskinan di daerah. Atas keputusan Bupati, dibentuklah TKPK hingga tingkat desa. Keanggotaan TKPK terdiri dari masyarakat, dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya dalam memerangi kemiskinan. Selain itu, koordinasi merupakan mekanisme yang efektif untuk implementasi kebijakan. Semakin baik koordinasi komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam mengimplementasikan suatu kebijakan, semakin kecil kesalahannya dan sebaliknya. Koordinasi antar pelaksana politik yang tidak berhasil membuat proses pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Desa Skamandihilil Dusun IV tidak terlaksana secara maksimal.

Di Desa Skamandi Hilir Dusun IV, terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Pertama, komunikasi antara pemerintah desa dengan masyarakat kurang aktif, seperti kurangnya sosialisasi langsung kepada masyarakat terkait kebijakan program penanggulangan kemiskinan,

dan masyarakat mengetahui isinya, sehingga masyarakat kurang mendukung. . Karena politik tidak memahami tujuan politik, masyarakat tidak berpartisipasi aktif dalam meningkatkan pembangunan desa melalui upaya penanggulangan kemiskinan. Kedua, koordinasi antar pengambil kebijakan belum terlaksana dengan baik. Ada beberapa penyesuaian dalam pelaksanaannya, terutama dalam bentuk pengawasan/pembinaan, saling memberi informasi, dan upaya mencapai koordinasi yang efektif. Ketiga, beberapa program penanggulangan kemiskinan, seperti program pelatihan dan program dukungan usaha, tidak terlaksana dengan baik karena kurangnya komunikasi dan koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Desa Sukamandi Hilir Dusun IV. Dikarenakan kurangnya minat masyarakat untuk mengikuti program tersebut dan keengganan masyarakat untuk berwirausaha.

SIMPULAN

Pemberlakuan Perda Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Dusun IV Desa Skamandi Hilir banyak kekurangan. Kurangnya komunikasi dan sosialisasi yang efektif, dan koordinasi yang tidak memadai antara unit-unit penegakan kebijakan, menyebabkan program penanggulangan kemiskinan yang ada tidak berjalan sesuai rencana. Faktor yang menghambat pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Desa Skamandi Hilir adalah: Komunikasi yang tidak efektif antara pemerintah dan masyarakat menyebabkan kurangnya pemahaman publik tentang kebijakan, dan kurangnya partisipasi dalam kebijakan tersebut dan koordinasi antara lembaga terkait kebijakan, di mana masyarakat terlibat secara aktif dalam pelaksanaannya, artinya tindakan penanggulangan kemiskinan tidak dilaksanakan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Halawa, D. K., & Batubara, B. M. (2022). Efektivitas Kinerja Pegawai Pada Bidang Pemberdayaan Sosial Dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Nias Barat Effectiveness Performance Of Employees In The Field Of Social Development An. *Strukturasi : Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 4(2), 138-144. <https://doi.org/10.31289/strukturasi.v4i2.1409>
- Harahap, I. A., Siregar, T., & Harahap, A. J. (2016). Sistem Pelayanan bagi Masyarakat Miskin di Kelurahan Sei Rengas Permata Service. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 3(2).
- Hia, E. N., Siagian, M., & Achmad, N. (2021). Implementasi Family Development Session Program Keluarga Harapan. *Perspektif*, 10(1), 128-139. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i1.4146>
- Istriawati, N., & Dartanto, T. (2022). Dampak Bantuan Pangan Non Tunai terhadap Konsumsi Makanan dan Rokok pada Rumah Tangga Miskin di Indonesia. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(2), 1158-1172. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i2.1407>
- Jamaluddin, Y., Fitriani, F., Safrida, S., & Warjio, W. (2019). Strategi dan Model Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Sumatera Utara. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 9(1), 21. <https://doi.org/10.31289/jap.v9i1.2231>
- Kusumajati, & Kurniawan, T. (2019). Analisis Implementasi Kebijakan Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan bagi Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 9(2), 166-176. <https://doi.org/10.31289/jap.v9i2.2608>
- Larasati, L., Muda, I., Batubara, B. M., & Suharyanto, A. (2018). Peranan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk. *PERSPEKTIF*, 7(1), 13-18.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis* (3rd ed.). SAGE Publications, Inc.
- Muda, I., & Batubara, B. M. (2019). *Analisis Kebijakan Publik (Revisi)*. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Mulyana, D. (2015). *Ilmu Komunikasi*. Remaja Rosda Karya.
- Sitepu, Y. A., Kadir, A., & Dewi, R. (2019). Evaluasi Program Keluarga Harapan di Desa Minta Kasih Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat Evaluation of the Family Hope Program in the village of Minta Kasih , Salapian District , Langkat Regency. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 1(1), 54-61.
- Soewadji, J. (2012). *Pengantar metodologi penelitian*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Suyanto, B. (1996). *Perangkap kemiskinan: problem dan strategi pengentasannya dalam pembangunan desa*. Aditya Media.
- Suyanto, B., & Sutinah. (2011). *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan* (Revisi). Kencana.
- Tontowi, A. (2010). *Studi Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2kp) Di Desa Purbayan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo*. UNS (Sebelas Maret University).
- Ujung, I. H., & Rangkuti, B. (2014). Analisis Pelayanan Prima terhadap Pelaksanaan Pembagian Beras Miskin (Raskin) di Kecamatan Sidikalang. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 2(1), 56-70. <https://doi.org/10.31289/jap.v4i1.1361>